

# Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang

Siti Wahyuni\*, M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1831>

\*Correspondence: Siti Wahyuni

Email: [wahyuni03siti@gmail.com](mailto:wahyuni03siti@gmail.com)

Received: 12-10-2024

Accepted: 03-11-2024

Published: 07-12-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan generasi milenial yang kurang terlibat dalam politik. Meskipun mereka menggunakan hak pilih saat pemungutan suara, keterlibatan dalam diskusi isu-isu pemilu dan sebagai panitia penyelenggara masih minim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik generasi milenial serta hubungannya dengan jenis kelamin dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kota Padang. Populasi penelitian adalah generasi milenial berusia 28-43 tahun, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih melalui teknik Multistage Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan korelasi Pearson. Hasil menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial pada pemilihan presiden 2024 di Kota Padang hanya 29,48% yang tergolong rendah. Namun, jika dilihat lebih detail partisipasi tertinggi ada pada kegiatan voting, dengan rata-rata 81,62% yang berada pada kategori sangat tinggi. Kemudian, keterlibatan dalam diskusi politik sebesar 41,8% dan kegiatan kampanye sebesar 54,98% dengan kategori sedang. Kemudian keterlibatan

sebagai relawan paslon (1%), anggota KPPS (12%), saksi pemilu (13%), dan pengawas TPS (2%) dengan kategori sangat rendah. Selanjutnya hubungan antara jenis kelamin dan partisipasi politik menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah, dengan nilai Pearson Correlation sebesar -0,122. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,225 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Kemudian hubungan antara pekerjaan dan partisipasi politik juga menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah dengan nilai Pearson Correlation sebesar -0,003. Ini berarti perubahan dalam jenis pekerjaan hampir tidak mempengaruhi partisipasi politik. Nilai signifikansi sebesar 0,974 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

**Kata Kunci:** Generasi Milenial, Partisipasi Politik, Pemilihan Presiden

**Abstract:** This research is motivated by the tendency of the millennial generation to be less involved in politics. Although they exercise their right to vote during voting, their involvement in the discussion of election issues and as an organizing committee is still minimal. The purpose of this study is to explain the level of political participation of the millennial generation and its relationship with gender and occupation. This study uses a descriptive quantitative method. The location of the research is in Padang City. The research population is the millennial generation aged 28-43 years, with a sample of 100 respondents selected through the Multistage Random Sampling technique. Data collection is carried out by distributing questionnaires or questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation. The results show that the level of political participation of the millennial generation in the 2024 presidential election in Padang City is only 29.48%, which is relatively low. However, if you look more at the details, the highest participation is in voting activities, with an average of 81.62% which is in the very high category. Then, involvement in political discussions was 41.8% and campaign activities were 54.98% in the medium category. Then the involvement as a candidate volunteer (1%), KPPS member (12%), election witness (13%), and polling station supervisor (2%) with a very low category. Furthermore, the relationship between gender and political participation showed a very weak negative correlation, with a Pearson Correlation value of -0.122. In addition, a significance value of 0.225 indicates that this relationship is not statistically significant. Then the relationship between employment and political participation also showed a very weak negative correlation with a Pearson Correlation value of -0.003. This means that changes in the type of work hardly affect political participation. A significance value of 0.974 indicates that this relationship is not statistically significant.

---

**Keywords:** *Millenial Generation, Political Participation, Presidential Election*

---

## Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan kesempatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi melalui pemungutan suara individu yang telah memiliki hak pilih untuk memberikan dukungan kepada pilihannya. Harahap & Selatan (2020). Pemilu diatur secara luas melalui Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945, dan secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam sistem demokrasi modern, pemilihan umum (pemilu) adalah komponen utama yang diperlukan dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilu juga mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan pemilihan pejabat pemerintahan secara adil dan demokratis, memberikan kesempatan kepada semua kandidat untuk bersaing dengan cara yang sehat dan transparan (Damayanti, A. S. & Agus, 2022).

Menurut Miaz (2012:20), partisipasi politik adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik, baik itu melalui proses pemilihan pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melibatkan berbagai tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, dan menjadi anggota partai politik. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga mencakup proses menghimpun dan mengarahkan aspirasi politik dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan negara. Dalam kerangka pemilihan presiden, keterlibatan masyarakat tercermin melalui hak untuk memilih atau dipilih dan aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang mempengaruhi partisipasi publik. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan menunjukkan tingkat kedewasaan politik masyarakat.

Berdasarkan data dari KPU Pusat dalam Pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 204.807.222 orang. Sekitar 66.822.389 individu, yang setara dengan 33,60 persen dari total pemilih, merupakan generasi milenial. Sementara itu, generasi Z berkontribusi dengan 46.800.161 pemilih atau sekitar 22,85 persen dari keseluruhan DPT. Gabungan dari kedua generasi ini menghasilkan dominasi sebesar 56,45 persen dari seluruh pemilih yang terdaftar. Persentase yang signifikan ini menegaskan bahwa generasi Z dan milenial memiliki potensi besar untuk memengaruhi perubahan dan memberikan kontribusi positif dalam proses pengambilan keputusan politik (Yolency, 2024).

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 4.088.606 pemilih. Total ada 4.088.606 pemilih di Sumatera Barat yang terdiri dari 2.027.360 pemilih pria dan 2.061.246 pemilih wanita. Pemilih terbanyak di provinsi Sumatera Barat ada di Kota Padang yaitu sebanyak

666.178 pemilih yang terdiri dari 325.912 pria dan 340.266 pemilih wanita (Antaranews.com, 2023).

Kelompok pemilih paling banyak di Kota Padang pada pemilu 2024 yaitu generasi milenial dengan total mencapai 222.424 pemilih. Generasi milenial ini melibatkan pemilih berusia 28-43 tahun, yang secara proporsional menyumbang jumlah pemilih terbesar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Pemilih generasi milenial memiliki peran yang penting dalam menentukan arah dan kebijakan politik di masa depan, mengingat jumlah mereka yang besar (Balsys, 2022; Deliana, 2020; Larkin, 2014; Mashuri, 2019; Saputro, 2023; Sayyed, 2020). Keterlibatan aktif generasi ini dalam proses pemilihan dapat memberikan dampak besar terhadap dinamika politik dan pembangunan di Kota Padang.

Partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam pemilihan umum mengalami dinamika naik turun yang cukup signifikan selama beberapa siklus pemilihan presiden terakhir. Pada Pemilu Presiden 2014, tingkat partisipasi politik hanya mencapai 61,31%. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang relatif rendah dari warga dalam proses demokrasi. Namun, pada Pemilu 2019, terjadi peningkatan yang cukup drastis di mana partisipasi politik melonjak menjadi 80,03%. Peningkatan ini bisa diasumsikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran politik dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Namun, pada Pemilu 2024, terjadi penurunan signifikan pada tingkat partisipasi, dengan angka turun menjadi 74,18% (KPU Kota Padang, 2024).

Generasi milenial mempunyai kecakapan sosial yang sangat baik, baik dalam interaksi sehari-hari (dunia nyata) maupun dalam interaksi digital (dunia maya) (Fuchs, 2014; Hilty, 2018; Saputro, 2023; Sayyed, 2020; Zheng, 2016). Kemampuan generasi milenial untuk bersosialisasi diperkuat oleh aksesibilitas informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Namun yang menjadi permasalahan yaitu generasi milenial cenderung kurang terlibat dalam politik, mereka memang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara akan tetapi keterlibatan dalam membahas isu-isu pemilu masih belum begitu antusias. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik mengangkat kedalam suatu penelitian dengan judul **"Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang"**.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Menurut Sulistyawati, dkk (2022) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data angka yang ada, tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi millenial (usia 28-43 tahun). Berdasarkan KPU Kota Padang data pemilih milenial pada pemilu 2024 berjumlah 222.424 pemilih. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang ditentukan adalah 100 orang responden. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, biaya dan jumlah populasi yang sangat banyak. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan Rumus Slovin. Pada penelitian ini mengambil jenis teknik probability sampling yaitu semua

sampel memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat terpilih (Sugiyono, 2012:92).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Multistage Random Sampling*. Pada tahap pertama menggunakan *Cluster Sampling* (sampel daerah) Setelah ditentukan sampel area maka tahap kedua diterapkan teknik *proportional random sampling*. Dari 11 kecamatan yang menjadi populasi maka ditentukan sampel area/daerah sebanyak 3 kecamatan yaitu Koto Tengah, Kuranji dan Lubuk Begalung, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan angket atau kuesioner. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis koefisien korelasi. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Muhson, 2018). Koefisien korelasi product momen adalah teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel tersebut adalah sama (Indrawan & Kaniawati Dewi, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang

Tingkat partisipasi politik generasi milenial di Kota Padang pada Pemilihan Presiden 2024 diukur menggunakan beberapa indikator, termasuk tindakan langsung seperti voting serta keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi politik, kampanye, dan peran dalam penyelenggaraan pemilu. Data yang diperoleh menunjukkan variasi dalam tingkat partisipasi, mencerminkan sejauh mana generasi milenial terlibat dalam proses politik secara keseluruhan.

#### a. Voting

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa keterlibatan milenial dalam partisipasi politik terutama dalam pemberian suara (voting) dapat dikatakan aktif. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan, dimana dari 100 responden yang mengisi kuesioner, semuanya menjawab bahwa mereka ikut memberikan suara pada pemilihan presiden 2024 di Kota Padang. Selain itu berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada generasi Milenial Kota Padang, setelah dilakukan perhitungan diperoleh rata-rata nilai sebesar 81,62%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial di Kota Padang khususnya dalam pemungutan suara berada pada kategori sangat tinggi.

Pemberian suara (voting) merupakan tindakan atau kegiatan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elit yang berkuasa (Sutami, et al., 2022). Adanya partisipasi generasi milenial dalam pemberian suara (voting) sejalan dengan teori Miriam Budiardjo (2008: 367) sebagaimana disampaikan oleh (Suparto, 2021:11), yang mengatakan bahwa partisipasi politik mengacu pada aktivitas individu atau kelompok

yang secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, termasuk dalam bentuk memilih presiden yang memiliki dampak (baik secara langsung maupun tidak langsung) pada proses perumusan kebijakan.

Selanjutnya (Adnan et al., 2021) juga mengatakan bahwa pemuda merupakan indikator utama perubahan masyarakat, dan jumlah pemuda sangatlah banyak di masyarakat Indonesia. Ini adalah kesempatan sempurna bagi pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutami, et al., 2022) dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020”. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pemberian suara dalam pemilihan umum dapat mempengaruhi arah demokrasi, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Purworejo mencapai 94,5%. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam pemilihan sangat tinggi, bahkan melebihi target partisipasi yang ditetapkan untuk tingkat desa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Artanti, 2016) dengan judul “Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Kudus pada Pilkada 2018 tercatat tinggi, yaitu mencapai 84,25%. Meskipun angka ini mencerminkan keterlibatan yang signifikan dari berbagai kalangan, tidak hanya terbatas pada milenial, keterlibatan milenial dalam partisipasi politik terlihat aktif dalam hal pemberian suara. Namun, keterlibatan mereka dalam diskusi politik dan kampanye masih tergolong rendah, terutama di kalangan milenial yang merupakan pelajar dan mahasiswa.

### **b. Diskusi politik**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan rata-rata terkait partisipasi politik generasi milenial Kota Padang dalam diskusi politik terkait pemilu memperoleh hasil sebesar 41,8%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam diskusi politik di Kota Padang berada pada kategori sedang.

Diskusi politik terkait pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi yang penting dalam proses demokrasi, terutama di kalangan generasi muda. Melalui diskusi para pemilih termasuk generasi milenial dapat memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu politik, kandidat, dan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Partisipasi dalam diskusi politik juga memungkinkan generasi muda untuk mengekspresikan pandangan mereka, mendebatkan berbagai sudut pandang, dan berkontribusi dalam membentuk opini publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara generasi milenial terdengar dan terwakili dalam proses politik.

Keterlibatan generasi milenial dalam diskusi politik sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Riyanti et al., 2023) yang menyebutkan bahwa anak muda dapat meningkatkan kesadaran politik mereka dengan berpartisipasi dalam organisasi sosial dan kepemudaan. Kegiatan seperti seminar, pelatihan kepemimpinan, dan kampanye sosial dapat memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu politik serta memperkuat keterlibatan mereka dalam masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya terlihat dalam

pemilihan umum, tetapi juga dalam aktivitas lain seperti debat, kampanye sosial, dan upaya advokasi untuk perubahan positif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salman Farid, 2023) dengan judul “Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik dan Persepsi Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik memiliki dampak yang besar terhadap perilaku dan partisipasi politik serta persepsi publik. Media sosial terbukti efektif dalam mendorong partisipasi politik karena menyediakan platform yang mudah diakses dan interaktif. Selain itu, media sosial membantu membentuk opini publik dengan cepat menyebarkan pesan politik dan memfasilitasi diskusi. Namun, ada tantangan seperti penyebaran informasi yang salah dan akses terbatas ke berbagai pandangan. Meskipun begitu, komunikasi dua arah yang bisa dilakukan melalui media sosial membantu memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam politik.

### **c. Menghadiri dan mengikuti Kampanye**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan rata-rata terkait partisipasi politik generasi milenial Kota Padang dalam menghadiri dan mengikuti kampanye diperoleh hasil rata-rata sebesar 54,98 %. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam mengikuti dan menghadiri kampanye berada pada kategori sedang.

Keterlibatan generasi milenial dalam politik sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnan et al., 2021), dalam penelitiannya disebutkan bahwa keterlibatan generasi muda Indonesia sangat penting dalam isu-isu politik. Media sosial memberikan platform yang memungkinkan generasi muda untuk berdebat tentang politik melalui berbagai grup, situs, dan akun online.

Keterlibatan generasi milenial dalam menghadiri dan mengikuti kampanye di Kota Padang pada pemilihan presiden 2024 masih berada pada kategori sedang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2019) dengan judul “Peran Relawan Penggemar (Pemuda Pendukung Genius Umar - Mardison) dalam Tim Kampanye Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018” dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018 adanya aktivitas relawan penggemar yang mencakup kampanye baik di dunia maya maupun dunia nyata, seperti edukasi bagi pemilih pemula melalui konten-konten kreatif di akun resmi mereka yang terdaftar di KPU. Selain itu, mereka juga terlibat dalam menjaring komunitas, melakukan survei, melatih saksi untuk TPS, dan melakukan real count.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Musa Karim dan rekan-rekannya pada tahun 2020 dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)” menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik Gen-Z di Kota Yogyakarta masih rendah. Keterlibatan mereka terbatas pada merespons konten politik dan mengikuti informasi politik secara sukarela,

tanpa berbagi konten tersebut. Selain itu, partisipasi politik mereka cenderung bersifat sementara, hanya aktif selama periode pemilihan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya. Padahal, partisipasi politik seharusnya tidak hanya mencakup pemilihan, tetapi juga termasuk peran dalam evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah.

#### **d. Relawan**

Berdasarkan hasil perhitungan untuk kategori menjadi relawan paslon dikalangan generasi milenial kota padang diperoleh hasil rata-rata sebesar 1%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam menjadi relawan paslon berada pada kategori sangat rendah. Generasi milenial memiliki kontribusi yang signifikan dalam kampanye politik.

Rendahnya partisipasi generasi milenial sebagai relawan paslon dalam Pilpres 2024 di Kota Padang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kesibukan pribadi, seperti fokus pada karier atau pendidikan, membuat mereka tidak memiliki waktu atau energi untuk menjadi relawan. Selain itu perbedaan prioritas juga mengakibatkan rendahnya partisipasi milenial dalam menjadi relawan paslon pada pemilu, milenial cenderung lebih tertarik pada isu-isu lain seperti ekonomi digital, lingkungan, atau hak asasi manusia, dari pada kampanye politik tradisional, kemudian kurangnya keterikatan emosional dengan calon yang ada, serta preferensi untuk mengekspresikan pandangan politik melalui media sosial dari pada terlibat langsung, semakin memperkuat rendahnya partisipasi ini.

Rendahnya keterlibatan generasi milenial Kota Padang sebagai relawan paslon pada pemilihan presiden 2024 kontra dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2019), dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa pada Pemilu Kota Pariaman Tahun 2018, muncul inisiatif dari kelompok relawan bernama PENGEMAR (Pemuda Pendukung Genius Umar-Mardison) yang terdiri dari anak-anak muda di Kota Pariaman. Kelompok ini didirikan untuk memberikan dukungan penuh terhadap Genius Umar dan Mardison dalam pencalonan mereka sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Hamdani et al., 2021) dengan judul "Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa relawan Samawi berperan aktif dalam berbagai aspek partisipasi politik selama Pilpres 2019. Para relawan ini terlibat dalam beberapa kegiatan penting, termasuk melawan narasi negatif, menanggulangi hoaks atau berita palsu, serta melakukan berbagai aktivitas relawan lainnya. Keterlibatan mereka memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik di kalangan pemuda di Kota Tasikmalaya selama pemilihan presiden.

#### **e. Menjadi saksi dalam pemilu**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan rata-rata terkait partisipasi politik generasi milenial Kota Padang dalam menjadi saksi pemilu pada

pemilihan presiden 2024 kota padang diperoleh hasil rata-rata sebesar 12%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam menjadi saksi dalam pemilu berada pada kategori sangat rendah. Hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata partisipasi politik generasi milenial Kota Padang sebagai saksi pemilu pada pemilihan presiden 2024 hanya sebesar 12% mengindikasikan tingkat keterlibatan yang sangat rendah dalam aspek penting dari proses pemilu. Saksi pemilu memiliki tanggung jawab utama untuk memantau jalannya pemilihan, memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan aturan, dan melaporkan adanya penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi ini bisa memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Partisipasi sebagai saksi pemilu memerlukan kesadaran politik yang tinggi, dedikasi, serta pemahaman mendalam tentang proses pemilu. Rendahnya angka ini bisa mencerminkan beberapa masalah mendasar, seperti kurangnya pendidikan politik yang efektif di kalangan generasi milenial atau minimnya upaya dari pihak penyelenggara pemilu dalam melibatkan generasi ini untuk mengambil peran tersebut. Selain itu, generasi milenial mungkin menghadapi kendala praktis seperti kesibukan akademik atau pekerjaan, serta kurangnya insentif yang cukup menarik untuk berpartisipasi sebagai saksi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Roland et al., 2024), Penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa dapat melakukan edukasi dan sosialisasi menggunakan berbagai platform, termasuk media sosial, media massa, dan forum diskusi, serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Mereka bisa terlibat dalam pengawasan pemilu sebelum, selama, dan setelah pemilihan, menjadi saksi pemilu, berpartisipasi dalam pengawasan, atau melaporkan dugaan praktik politik uang kepada pihak berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat dengan menolak praktik politik uang dan menolak penerimaan uang atau barang berharga dari calon peserta pemilu.

Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2019) dengan judul "Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015". Hasil penelitian menyebutkan bahwa hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi politik masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan demokrasi lokal, di mana setiap suara mempengaruhi masa depan suatu daerah. Beberapa faktor dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi, namun praktik politik uang atau transaksi politik dalam pemilihan umum kini semakin umum. Politik uang dapat mengurangi nilai demokrasi itu sendiri. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, praktik politik uang masih mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun hubungan antara politik uang dan tingkat partisipasi politik positif namun terbilang lemah, dampak politik uang dirasakan tidak hanya oleh masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga oleh mereka yang berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi semua lapisan sosial ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

#### **f. Menjadi anggota KPPS**

Berdasarkan perhitungan untuk kategori menjadi anggota KPPS dalam pemilu dikalangan generasi milenial kota padang diperoleh hasil rata-rata sebesar 13%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam menjadi anggota KPPS berada pada kategori sangat rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Polii et al., 2020) dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Kaum Milenial Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019”, menyebutkan bahwa generasi milenial di Kecamatan Tareran, generasi milenial menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup besar dalam pemilihan umum. Banyak milenial yang berperan aktif sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Keterlibatan mereka meningkat karena adanya perekrutan oleh pemerintah dan ketertarikan pribadi untuk mendapatkan pengalaman langsung serta berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Keterlibatan ini memberikan keuntungan berupa pengalaman berharga dan memenuhi keinginan mereka untuk berkontribusi langsung dalam proses pemilihan umum.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati & Yakub, 2024) dengan judul “Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang ternyata rendah, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menghambat antara lain adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemuda, terutama jika mereka belum memiliki pengalaman sebagai KPPS, minimnya sosialisasi dari penyelenggara Pemilu, dan kurang profesionalnya proses rekrutmen. Selain itu, sikap pemuda yang enggan terlibat dalam proses pemilu juga menjadi penghalang. Meskipun regulasi sudah mendukung partisipasi pemuda, masih ada kendala berupa ketidakpercayaan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap pemuda yang dianggap kurang berpengalaman, sehingga partisipasi inklusif sulit terwujud.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pandiangan, 2019) dengan judul “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja”. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPS sangat mempengaruhi kualitas Pemilu 2019 dan dapat menjadi subjek gugatan dari masyarakat dan peserta jika penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, keteraturan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Mengingat tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPPS yang sangat besar, diperlukan adanya penyesuaian dalam organisasi dan fasilitas serta peningkatan kesejahteraan bagi Ketua dan Anggota KPPS untuk mencerminkan beban kerja mereka di Pemilu 2019.

#### **g. Menjadi pengawas**

Berdasarkan perhitungan untuk kategori menjadi pengawas TPS dalam pemilu dikalangan generasi milenial kota padang diperoleh hasil rata-rata sebesar 2%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam menjadi pengawas TPS berada pada kategori sangat rendah. Angka rata-rata sebesar 2% untuk partisipasi generasi milenial dalam menjadi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang mau mengambil peran ini. Peran pengawas TPS sangat penting dalam pemilu karena mereka bertugas memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dengan partisipasi yang sangat rendah, hal ini menandakan adanya kurangnya kesadaran atau minat dari generasi milenial untuk berpartisipasi dalam aspek yang lebih teknis dan penting dari proses demokrasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zulhendra, 2019) dengan judul “Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia “. Dalam hasil penelitian tersebut disampaikan bahwa mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah hal yang penting dan wajib dilakukan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat berfungsi sebagai pilar utama dalam mengontrol proses pemilu. Salah satu cara yang dianggap efisien dan efektif adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi dan media sosial, untuk melibatkan publik. Mengingat kemajuan teknologi yang pesat, strategi ini semakin relevan. Beberapa model strategi pengawasan melibatkan masyarakat, termasuk pemetaan dan penguatan partisipan, penentuan konten informasi yang tepat, penyampaian informasi secara efektif, dan peran panwaslu sebagai fasilitator.

Berikut ini rincian tingkat partisipasi politik generasi milenial pada pemilihan presiden 2024 di Kota Padang:

Tabel 1: Rincian Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial

| No    | Jenis Partisipasi                 | Rata-Rata     | Kategori      |
|-------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Voting                            | 81,62%        | Sangat Tinggi |
| 2     | Diskusi Politik                   | 41,8%         | Sedang        |
| 3     | Menghadiri dan Mengikuti Kampanye | 54,98%        | Sedang        |
| 4     | Menjadi Relawan Paslon            | 1%            | Sangat Rendah |
| 5     | Menjadi Anggota KPPS              | 12%           | Sangat Rendah |
| 6     | Menjadi Saksi Pemilu              | 13%           | Sangat Rendah |
| 7     | Menjadi Pengawas TPS              | 2%            | Sangat Rendah |
| Total |                                   | <b>29,48%</b> | <b>Rendah</b> |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi politik generasi milenial pada pemilihan presiden 2024 di Kota Padang hanya mencapai 29,48%, yang dikategorikan rendah. Angka

ini mencerminkan bahwa sebagian besar generasi milenial di Kota Padang kurang aktif terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan politik yang diteliti. Meskipun mereka menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam voting, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi politik konvensional paling dasar, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi politik, kehadiran pada kampanye, dan peran-peran teknis dalam penyelenggaraan pemilu sangat terbatas.

Persentase yang rendah ini menunjukkan bahwa banyak milenial tidak terlibat dalam proses politik di luar pemungutan suara, seperti menjadi relawan pasangan calon, anggota KPPS, saksi pemilu, atau pengawas TPS. Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran atau minat terhadap politik, terbatasnya waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan keterlibatan generasi milenial dalam berbagai aspek proses politik.

2. Hubungan Jenis Kelamin dengan Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan partisipasi politik generasi milenial, maka dapat dilihat hasil analisis data penelitian sebagai berikut:

Tabel 2: Hubungan Jenis Kelamin dengan Partisipasi Politik  
Correlations

|                     |                     | Jenias Kelamin | Partisipasi Politik |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Jenias Kelamin      | Pearson Correlation | 1              | -.122               |
|                     | Sig. (2-tailed)     |                | .225                |
|                     | N                   | 100            | 100                 |
| Partisipasi Politik | Pearson Correlation | -.122          | 1                   |
|                     | Sig. (2-tailed)     | .225           |                     |
|                     | N                   | 100            | 100                 |

Sumber: Hasil Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin dan partisipasi politik, dimana Nilai Pearson Correlation sebesar -0,122 menunjukkan adanya korelasi negatif yang sangat lemah antara kedua variabel, yang berarti perubahan pada jenis kelamin hanya sedikit mempengaruhi partisipasi politik. Nilai signifikansi (Sig.

2-tailed) sebesar 0,225, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, mengindikasikan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

Penelitian ini kontra dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2017) dengan judul “Hubungan Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemberian Suara Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Desa Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jenis kelamin memberikan pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,001 terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara di Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Patmisari, 2019) dengan judul “Pengaruh Gender Terhadap Kesadaran Politik Siswa Sekolah Menengah Atas”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gender terhadap kesadaran politik siswa Sekolah Menengah Atas sebagai pemilih pemula di Kecamatan Bantul. Kesimpulannya gender berpengaruh terhadap kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nur Iqrima, Amrazi Zakso, 2019) dengan judul “Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur 2018 Ditinjau dari Jenis Kelamin Dan Pendidikan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan pemilih pemula berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor personal, faktor kesadaran, dan faktor kredibilitas terhadap pemerintah.

### **3. Hubungan Pekerjaan dengan Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang**

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi politik generasi milenial, maka dapat dilihat hasil analisis data penelitian sebagai berikut:

Tabel 3: Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Partisipasi Politik

Correlations

|                     |                     | Pekerjaan | Partisipasi Politik |
|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Pekerjaan           | Pearson Correlation | 1         | -.003               |
|                     | Sig. (2-tailed)     |           | .974                |
|                     | N                   | 100       | 100                 |
| Partisipasi Politik | Pearson Correlation | -.003     | 1                   |
|                     | Sig. (2-tailed)     | .974      |                     |
|                     | N                   | 100       | 100                 |

Sumber: Hasil Data Penelitian (2024)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pekerjaan dan partisipasi politik. Nilai Pearson Correlation sebesar  $-0,003$  menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang sangat lemah antara pekerjaan dan partisipasi politik. Angka ini sangat mendekati nol, yang berarti bahwa perubahan dalam jenis pekerjaan tidak memengaruhi tingkat partisipasi politik secara signifikan. Selain itu, nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $0,974$  jauh lebih besar dari  $0,05$ , yang menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suhartini & Mahmud, 2023) dengan judul “Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Keturunan Tionghoa Dalam Pilkada Di Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan status sosial memengaruhi cara berpikir mereka mengenai keterlibatan dalam kegiatan politik. Masyarakat cenderung memilih untuk berpartisipasi secara tertutup dan tidak aktif dalam kegiatan politik yang terbuka. Mereka hanya mengikuti dan melaksanakan sistem yang telah ditetapkan oleh elit politik. Hal ini diperkuat oleh kondisi penghasilan yang rendah, yang menyebabkan masyarakat lebih fokus pada pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari daripada terlibat dalam kegiatan politik atau urusan kenegaraan.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2020) dengan judul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dari status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari selama Pilkada Serentak Kota Banjar tahun 2018. Artinya, semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, semakin aktif mereka berpartisipasi dalam politik di Kecamatan Langensari. Peningkatan status sosial ekonomi berhubungan langsung dengan peningkatan partisipasi politik, yang menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat di wilayah tersebut berada pada kategori yang baik. Dengan kata lain, masyarakat dengan status sosial ekonomi yang

lebih tinggi cenderung lebih terlibat dalam proses politik, yang mengindikasikan tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi di daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suhartini & Mahmud (2023), yang menemukan bahwa faktor lingkungan dan status sosial mempengaruhi keterlibatan politik, dengan masyarakat cenderung berpartisipasi secara terbatas dan mengikuti sistem yang telah ditentukan oleh elit politik, terutama jika penghasilan mereka rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi mungkin lebih berpengaruh pada pola pikir politik daripada pekerjaan itu sendiri. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Dewi (2020), yang menunjukkan bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik, dengan masyarakat dengan status sosial ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks Kota Padang, jenis pekerjaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik, dan faktor-faktor seperti status sosial ekonomi mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar.

Dilihat dari penjabaran diatas diketahui bahwa jenis kelamin dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap partisipasi politik. Nilai korelasi yang rendah dan tidak signifikan secara statistik mengindikasikan bahwa kedua faktor ini bukanlah penentu utama dalam partisipasi politik. Ini berarti, meskipun jenis kelamin dan pekerjaan sering dianggap sebagai faktor demografis yang mungkin mempengaruhi bagaimana seseorang terlibat dalam politik, dalam konteks penelitian ini, keduanya tidak memberikan dampak yang berarti.

Partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan jenis pekerjaan saja. Jika kedua faktor tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap partisipasi politik, kemungkinan besar ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap informasi, serta kesadaran politik mungkin memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan seberapa aktif seseorang terlibat dalam kegiatan politik. Misalnya, tingkat pendidikan sering kali berkaitan dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan hak-hak individu, yang dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif. Pendapatan juga berperan penting, karena individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak sumber daya dan waktu untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Selain itu, akses terhadap informasi, terutama melalui media massa dan media sosial, sangat memengaruhi bagaimana seseorang terlibat dalam politik. Orang yang memiliki akses yang baik ke informasi cenderung lebih sadar akan isu-isu politik dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Tingkat kesadaran politik, yang dipengaruhi oleh pendidikan, latar belakang sosial, dan pengalaman pribadi, juga merupakan faktor penting yang mendorong partisipasi politik. Seseorang yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung lebih aktif dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti voting, berdiskusi tentang politik, ikut serta dalam kampanye politik, menjadi relawan paslon atau terlibat sebagai panitia penyelenggara pemilu.

## Penutup

### a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial pada pemilihan presiden 2024 di Kota Padang dikategorikan rendah karena hanya mencapai 29,48%. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar generasi milenial di Kota Padang kurang aktif terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan politik yang diteliti. Meskipun mereka menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam voting, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi politik konvensional paling dasar, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi politik, kehadiran pada kampanye, dan peran-peran teknis dalam penyelenggaraan pemilu sangat terbatas. Persentase yang rendah ini menunjukkan bahwa banyak milenial tidak terlibat dalam proses politik di luar pemungutan suara, seperti menjadi relawan pasangan calon, anggota KPPS, saksi pemilu, atau pengawas TPS. Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran atau minat terhadap politik, terbatasnya waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Kemudian terkait jenis kelamin dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap partisipasi politik. Nilai korelasi yang rendah dan tidak signifikan secara statistik mengindikasikan bahwa kedua faktor ini bukanlah penentu utama dalam partisipasi politik. Ini berarti, meskipun jenis kelamin dan pekerjaan sering dianggap sebagai faktor demografis yang mungkin mempengaruhi bagaimana seseorang terlibat dalam politik, dalam konteks penelitian ini, keduanya tidak memberikan dampak yang signifikan. Partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan jenis pekerjaan saja. Jika kedua faktor tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap partisipasi politik, kemungkinan besar ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap informasi, serta kesadaran politik mungkin memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan seberapa aktif seseorang terlibat dalam kegiatan politik.

### b. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah, KPU, dan penyelenggara pemilu lebih fokus pada peningkatan kesadaran dan pendidikan politik. Perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik, tidak hanya saat pemungutan suara. Selain itu, penyelenggara pemilu dan partai politik harus memanfaatkan platform media sosial secara efektif untuk menyelenggarakan diskusi politik interaktif, kampanye kreatif, dan penyebaran informasi yang relevan. Ini dapat mencakup webinar, diskusi live, polling online, dan kampanye visual yang menarik. Langkah-langkah ini akan membantu menyediakan lebih banyak kesempatan bagi generasi milenial untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti diskusi dan peran dalam penyelenggaraan pemilu.

## References

- Balsys, P. (2022). Social Integration of Millennial Generation in the Lithuanian Armed Forces - What Cultural Challenges are Waiting for Organization to Retain Individuals in the Military Service? *Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation*, 2022(1), 162–168. <https://doi.org/10.47459/cndcgs.2022.20>
- Adnan, M. F., Dalle, J., Malau, H., & Yvanka, V. (2021). The Influence of social media and Public Policy on Public Political Participation in Handling COVID-19 Pandemic: A Study from Indonesian Domestic and Overseas Youngsters' Perspective. *Croatian International Relations Review*, 27(87), 133–159. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2021-0006>
- Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015 diakses 28 juni 2022. *MENARA Ilmu*, 13(9), 72–85. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556>
- Budiwanto, S. (2017). Metode Statistika: Untuk Mengolah Data Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang 2017, 1–233.
- Deliana, Y. (2020). Identification baby boomer and millennial generation in buying dried mango. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Fuchs, C. (2014). Social media and the public sphere. *TripleC*, 12(1), 57–101. <https://doi.org/10.31269/vol12iss1pp57-101>
- Hilty, D. M. (2018). Social Media/Networking and Psychiatric Education: Competencies, Teaching Methods, and Implications. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 3(4), 268–293. <https://doi.org/10.1007/s41347-018-0061-7>
- Larkin, M. (2014). How the rise of the millennial generation could mean changes in the way veterinarians do business. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 245(9), 975–981.
- Mashuri, M. A. (2019). Motives and construction of independence, competence, and innovation millennial generation in electronic. *Opcion*, 35, 1556–1571.
- Musa Karim, A., Wibawa, A., & Toko Arisanto, P. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>

- Nur Iqrima, Amrazi Zakso, S. (2019). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur. *Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE)*, 2(2), 256–261.
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Patmisari, A. G. (2019). PENGARUH GENDER TERHADAP KESADARAN POLITIK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS. *JIPPK*, 4, 5–10.
- Polii, E. Z. F., Pati, A. B., & Potabuga, J. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Kaum Milenial Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019. *Jurnal Politico*, 9(3), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30759>
- Riyanti, R., Hukum, F., Pahlawan, U., Tambusai, T., Luthfi, A., Pahlawan, U., Tambusai, T., Rohana, D., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–31.
- Roland, H., Sitorus, P., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Mahasiswa Sebagai Kaum Intelektual Dalam Mencegah Money Politik Pada Pemilu 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia. 3, 4696–4702.
- Rosalina, et al. (n.d.). BUKU AJAR STATISTIKA (Eliza (Ed.)). CV. MUHARIKA RUMAH ILMIAH.
- Salman Farid, A. (2023). Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik Dan Persepsi Publik. *QAULAN Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 45–50.
- Saputro, R. H. (2023). Gaining Millenial and Generation Z Vote: Social Media Optimization by Islamic Political Parties. *Res Militaris*, 13(1), 323–336.
- Sayyed, B. J. W. (2020). Social Media Impact: Generation Z and Millenial on the Cathedra of Social Media. *ICRITO 2020 - IEEE 8th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)*, 595–600. <https://doi.org/10.1109/ICRITO48877.2020.9197995>
- Sulistiyawati Wiwik, W. & S. T. (2022). Analisis Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Blended Learning Saat Pandemi Covid-19 (Deskriptif Kuantitatif Di Sman 1 Babadan Ponorogo). *KadikmA*, 13(1), 68. <https://doi.org/10.19184/kdma.v13i1.31327>

- 
- Sulistyowati, D., & Yakub, A. (2024). REFLEKSI PARTISIPASI PEMUDA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MENUJU PEMILU 2024. 6(8).
- Sutami, Sultan Afrian, Marlien, W. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. *Eksekutif*, 2(3), 1–11.
- Yolency. (2024). Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tatahan Politik Baru pada Pemilu 2024. <https://Tubankab.Go.Id/>. [https://tubankab.go.id/entry/peran-penting-gen-z-dan-milenial-menuju-tatanaan-politik-baru-pada-pemilu-2024#:~:text=Komisi Pemilihan Umum \(KPU\) telah,persen pemilih dari generasi milenial](https://tubankab.go.id/entry/peran-penting-gen-z-dan-milenial-menuju-tatanaan-politik-baru-pada-pemilu-2024#:~:text=Komisi%20Pemilihan%20Umum%20(KPU)%20telah,persen%20pemilih%20dari%20generasi%20milenial)
- Zheng, Y. (2016). Affordances of social media in collective action: The case of Free Lunch for Children in China. *Information Systems Journal*, 26(3), 289–313. <https://doi.org/10.1111/isj.12096>
- Zulhendra, J. (2019). Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia. 7, 30–37.